

**UPAYA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM
MENSEJAHTERAKAN PETANI DAN INDUSTRI KOPI ROBUSTA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Pada Petani Kopi dan Industri Kopi di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten
Tanggamus)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

YUSHA HARIABRATA

NPM. 1621020212

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H/2021 M

**UPAYA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM
MENSEJAHTERAKAN PETANI DAN INDUSTRI KOPI ROBUSTA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Pada Petani Kopi dan Industri Kopi di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten
Tanggamus)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

YUSHA HARIABRATA

NPM. 1621020212

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyah)

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Pembimbing II : Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Provinsi Lampung di identikan dengan varietas kopi terbaiknya yaitu kopi robusta Lampung yang memiliki cita rasa yang cenderung pahit serta aroma yang kuat sehingga banyak di gemari oleh masyarakat sehingga banyak diminati oleh masyarakat luas. Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah penyokong terbesar kopi robusta di Indonesia dengan rata-rata produksi 100.000 ton biji kopi kering pertahunnya, yang 70% nya digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekspor nasional. Sehingga diperlukannya suatu dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan petani kopi serta kemajuan industri kopi robusta di Lampung, dengan membuat Rancangan Peraturan Daerah yang menspesifikasikan kopi robusta Lampung.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mensejahterakan petani kopi serta meningkatkan kemajuan industri kopi robusta berdasarkan Surat Edaran Gubernur Lampung No. 045.2/2123/V.22/2018 Tentang Penggunaan Produk Kopi Lampung, dalam perspektif *siyasah dusturiyah* Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya serta peran pemerintah Provinsi Lampung dalam mensejahterakan petani kopi serta kemajuan industri kopi robusta Menurut Surat Edaran Gubernur Lampung dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang didapat dari sejumlah responden yang terdiri dari pihak pemerintah, petani kopi, dan pemilik industri kecil menengah (IKM) yang berada di tempat sample penelitian. Sedangkan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan literasi dari perpustakaan. Pengumpulan data menggunakan metode interview, dokumentasi dan pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa upaya pemerintah dalam mensejahterakan petani dan industri kopi robusta di lampung masih dikatakan berjalan, Karena pelaksanaan yang ada masih secara bertahap, sehingga belum sepenuhnya terealisasi secara maksimal berupa pelatihan maupun bantuan. Sehingga Implementasi dari Surat Edaran Gubernur Lampung No. 045.2/2123/ V.22/2018 Tentang Penggunaan Produk Kopi Lampung, perlu dikuatkan dengan pembentukan Raperda yang menspesifikasikan kopi robusta Lampung dan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan daerah hendaknya pemerintah provinsi dalam hal ini kepala daerah yang mempunyai wewenang agar berkoordinasi dengan DPRD selaku wakil rakyat yang juga berhak dalam membentuk serta menentukan peraturan di daerahnya dengan menjunjung prinsip musyawarah yang berkeadilan serta tetap memperdoman *Al-Qur'an* dan *Hadist* sebagai rujukan dalam menentukan kebijakan maupun keputusan yang adil serta bermanfaat bagi kemaslahatan rakyatnya.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusha Hariabrata
NPM : 1621020212
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Upaya Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Mensejahterakan Petani dan Industri Kopi Robusta Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Petani Kopi dan Industri Kopi di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)**

adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Desember 2020

Penulis.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Mensejahterakan Petani dan Industri Kopi Robusta Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Petani Kopi dan Industri Kopi di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)

Nama : Yusha Hariabrata

NPM : 1621020212

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I.

Pembimbing II.

Drs. H. Irwanto, M.Hum.
NIP.196010211991031002

Syeh Sarip Hadaivatullah, S.H.I., M.H.I.

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si
NIP. 198003122009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukaramo Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Upaya Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Mensejahterakan Petani dan Industri Kopi Robusta Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Petani Kopi dan Industri Kopi di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)” disusun oleh Yusha Hariabrata, NPM : 1621020212, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah). Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : 5 Januari 2021

Tim Penguji

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H.

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I.,M.Ag.

Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Penguji III : Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I.,M.H.I.



Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

Pertanian adalah sumber fundamental dari kemakmuran nasional

-Anonim



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat, dan kebarokan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan sukses. Skripsi ini saya persembahkan teruntuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Anthony dan Ibunda Suciningsih, S.Mat. yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, dan membinaiku sejak kecil hingga saat ini. Terima kasih atas semangat, dukungan, kesabaran, nasihat, dan kasih sayang yang telah kalian berikan dengan do'a dan ridho serta segenap jasa-jasa yang tak terbatas demi meraih keberhasilan dan kesuksesanku kelak. Semoga Allah SWT, selalu memberikan kesehatan serta kebarokahan-Nya kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Teruntuk Kakak, Abang, Adik dan Iparku tercinta, Harialeza, S.Pt., Bima Hariaputra, A.Md., Refita Hariaputri, A.Md, Panca Hariabuana, Eddy Jatiwaluyo, S.Pt.,MBA., Diana Puspitasari, S.H., Irham Richfiansyah, S.P. serta para Keponakanku tersayang. Yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan do'anya untuk keberhasilan ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Yusha Hariabrata, dilahirkan pada tanggal 7 Juni 1997 di Bandar Lampung, yang merupakan anak keempat dari lima bersaudara pasangan Bapak Anthony dan Ibu Suciningsih. Penulis bertempat tinggal di desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan.

Riwayat pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu:

1. TK Kartika II-28 Bandar Lampung 2002-2003.
2. SD Kartika II-5 Bandar Lampung 2003-2009.
3. SMPN 25 Bandar Lampung 2009-2012.
4. MAN 2 Bandar Lampung 2013-2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Mensejahterakan Petani dan Industri Kopi Robusta Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Pada Petani Kopi dan Industri Kopi di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)”**. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M. Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Siyash Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Siyash Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

5. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, motivasi, masukan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I.,M.H. Selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta sumbangsih pemikiran selama penulis hadir dibangku kuliah hingga selesai.
8. Bapak Suwarno S.Ag. Selaku Camat Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian terhadap para petani kopi dan IKM yang ada di Kecamatan Ulu Belu, serta pihak-pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.
9. Karyawan dan karyawan Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
10. Pimpinan perpustakaan dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah maupun Perpustakaan Pusat yang telah memberikan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam penyusunan skripsi ini.
11. Terimakasih juga untuk Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Lampung beserta Staf, yang telah berkenan meminjamkan koleksi bukunya sebagai refrensi dalam penyusunan skripsi ini.

12. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat karibku yang sudah berkontribusi serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam pengerjaan skripsi ini, Ahmad Sholihin, Ahmad Aliy Mukti, Sigit Winarto, Rika Astuti Allen Indra Yudha, Ayu Setiani S.H., Ridho Rahmadi, Terimakasih atas bantuan, masukan dan arahnya selama ini.
13. Terimakasih Sahabat terbaikku Ridho Purnomo Tanjung, Arif Setiadi, Kiki Setiawan, Dion Setiawan, Gustian Fernando. Terimakasih selalu ada serta menemani hingga saat ini dan tiada henti-hentinya untuk mensupport agar cepat selesai mengerjakan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat satu kosan selama ini, Indra Wijaya, David Santoso, Fahrial Arif. Terimakasih atas canda tawa serta kebersamaan selama ini.
15. Teman-teman seperjuangan Prodi Siyasah Syar'iyah C terima kasih sudah menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir ini.
16. Rekan-rekan Magang KPU Kota Bandar Lampung 2018, Uspan Hadiansyah S.H, Isa Abdillah, Yuliana Sari S.H, Ayu Rizki Wahyuni, Nova Finaletta, Richa Rachma Hilda. Terimakasih atas kerjasamanya selama kegiatan magang dilaksanakan dari awal hingga akhir.
17. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatas kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Semoga dengan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 17 Desember 2020

Penulis

Yusha Hariabrata.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	10
E. Rumusan dan Batasan Masalah.....	11
F. Tujuan Penelitian	12
G. Signifikansi Penelitian	12
H. Metode Penelitian	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Siyasah Dusturiyah	20
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	20
2. Pengertian Siyasah Dusturiyah	22
3. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	23
4. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah	25
B. Industri Kopi Robusta Dalam Surat Edaran Gubernur Lampung No. 045.2/2123/V.22/2018 Tentang Penggunaan Produk Kopi Lampung.....	29
1. Upaya Pemerintah Daerah	29
2. Petani	34
3. Kopi.....	36
4. Industri	51
C. Tinjauan Pustaka.....	54

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1. Sejarah Kecamatan Ulu Belu	57
2. Visi Misi Kecamatan Ulu Belu	57
3. Keadaan Geografis Kecamatan Ulu Belu	58
4. Kondisi Masyarakat Kecamatan Ulu Belu.....	62
5. Pemerintah Kecamatan Ulu Belu.....	65
B. Keadaan Umum Petani dan Industri Kopi di Kecamatan Ulu Belu.....	68
1. Sumber Daya Manusia Petani Kopi di Kecamatan Ulu Belu	68
2. Sumber Daya Manusia Industri Kopi di Kecamatan Ulu Belu	70
3. Respon Petani dan Industri Kopi Terkait Surat Edaran Gubernur Lampung	74
4. Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Petani dan Industri Kopi	77

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

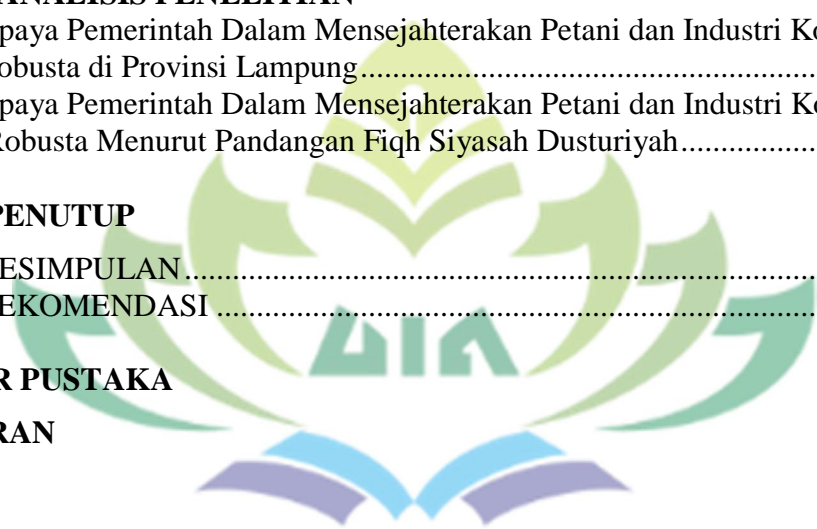
A. Upaya Pemerintah Dalam Mensejahterakan Petani dan Industri Kopi Robusta di Provinsi Lampung	82
B. Upaya Pemerintah Dalam Mensejahterakan Petani dan Industri Kopi Robusta Menurut Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	88

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	93
B. REKOMENDASI	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. 3.1 Luas Wilayah Kecamatan Ulu Belu Per Pekon	60
2. 3.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Ulu Belu.....	61
3. 3.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Ulu Belu per Pekon	61
4. 3.4 Jumlah Agama di Kecamatan Ulu Belu	63
5. 3.5 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Ulu Belu per Pekon	64
6. 3.6 Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Ulu Belu	66
7. 3.7 Tenaga Kesehatan di Kecamatan Ulu Belu.....	66
8. 3.8 Nama-nama Camat yang pernah atau sedang menjabat	67
9. 3.9 Luas Area Perkebunan dan Produksi Kopi di Kecamatan Ulu Belu.....	69
10. 3.10 Harga Biji Kopi per Kg nya di Kecamatan Ulu Belu	72
11. 3.11 Harga Jual Bubuk Kopi di Kecamatan Ulu Belu	74

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. 4.1 Skema Pemasaran Kopi Secara Modern di Indonesia 83



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Pedoman Wawancara
2. Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam rangka untuk memahami pokok bahasan penelitian ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, adapun judul skripsi ini adalah **“Upaya Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Mensejahterakan Petani dan Industri Kopi Robusta Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Pada Petani Kopi dan Industri Kopi di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)”**.

Untuk meminimalisir adanya suatu kesalahan dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup penelitian, maka perlu adanya suatu penegasan judul, yaitu:

Pemerintah Provinsi

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ yang di maksudkan dalam judul ini adalah Pemerintah Provinsi Lampung.

¹ Suryo Sakti, *Gubernur Kedudukan, Peran, dan Kewenangannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 41.

Petani

adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah, dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.²

Kopi Robusta

adalah kopi yang sudah umum di Indonesia yang sering di gunakan untuk konsumsi sendiri maupun untuk industri. Kopi robusta masuk dalam kopi kelas 2, karena rasanya yang lebih pahit, sedikit asam, dan mengandung kafein dalam kadar yang jauh lebih tinggi sehingga memberikan efek sulit tidur dan debar jantung yang berlebihan.³

Industri

adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk/jasa yang relatif sejenis, atau mempunyai sifat saling mengganti yang erat.⁴

Perspektif

adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu, yang akan menambah wawasan atau pengetahuan

² Idianto, *Ekonomi Pertanian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 54.

³ Buku, *Peluang Usaha IKM Kopi* (Kementerian Perindustrian, 2017), h. 13.

⁴ Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 295.

seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas⁵.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara.⁶

Berdasarkan beberapa pembahasan istilah di atas dapat disimpulkan, yang dimaksud judul Upaya Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Mensejahterakan Petani dan Industri Kopi Robusta Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Petani Kopi dan Industri Kopi di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus) adalah bagaimana perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap upaya pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan petani kopi serta kemajuan industri kopi robusta di Lampung saat ini. Dalam hal ini perlu adanya upaya dari Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal kemajuan industri kopi robusta Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan para petani kopi yang ada di Provinsi Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara objektif dan subjektif adalah sebagai berikut:

⁵ Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Seti, 2013), h. 250.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Prenadamedia Group, 2014), h. 177.

1. Secara objektif

- a. Karena Selama ini belum adanya regulasi berupa Peraturan Daerah (PERDA) yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk memberi perlindungan bagi para petani kopi ketika musim panen tiba.
- b. Karena Selama ini Masyarakat Khususnya Masyarakat Lampung Sendiri belum sepenuhnya memakai produk dari industri Kopi Lampung itu sendiri.
- c. Karena judul skripsi ini belum pernah dibahas sebelumnya, oleh karena itu perlu adanya untuk mengkaji dan membahasnya.

2. Secara Subjektif

- a. Dari aspek yang diteliti oleh penulis mengenai permasalahan tersebut serta dengan tersedianya literatur yang menunjang penulis, maka sangatlah memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Menurut penulis kajian yang berhubungan dengan judul skripsi ini belum banyak yang mengkaji, oleh karena itu perlu untuk mengkajinya.
- c. Untuk menambah wawasan bagi pembaca atau mahasiswa khususnya di UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini antara lain konsep-konsep Konstitusi (Undang-undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya

Perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas suatu konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁷ Didalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁸

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah penyokong terbesar biji kopi robusta di Indonesia dengan rata-rata produksi 100.000 Ton biji kopi kering pertahunnya yang 70 persennya di gunakan untuk menambah ekspor nasional.⁹ Sudah menjadi kenyataan bahwa masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Industrialisasi pertanian merupakan suatu kesepakatan strategi yang tepat untuk mengembangkan perekonomian, khususnya untuk para petani Industri yang berbasis pertanian

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177.

⁸ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 47.

⁹ Ekspor Kopi Robusta Lampung”(On-line), tersedia di: <https://www.saibumi.com/artikel-97311-festival-kopi-lampung-2019-diharapkan-mampu-dongkrak-daya-saing-robusta-.html> (3 Maret 2020).

diupayakan mampu memberikan nilai tambah dan mendapatkan pengembangan dari hasil pertanian.¹⁰

Melalui pengelolaan potensi sumber daya manusia yang baik dapat menambah pengembangan perekonomian dan jika di lihat dari potensi pasar serta investasi di Provinsi Lampung bisnis dan usaha pertanian mengenai kopi sangat menguntungkan, di karenakan potensi wilayah penghasil kopi serta permintaan ekspor kopi robusta yang tinggi baik di pasar dalam negeri maupun permintaan pasar luar negeri (ekspor). Sebab itu perlu adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga eksistensi kopi robusta Lampung agar dapat memajukan industri kopi serta mensejahterakan para petani kopi yang telah berjuang keras menghasilkan biji kopi terbaik untuk kita konsumsi.

Dalam hal ini, Pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalankan serta mengatur otonominya mempunyai Hak dan Kewajiban untuk kemajuan daerahnya sendiri, sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Daerah yang di jelaskan pada pasal 21 Huruf (a), bahwa “mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya” dan di huruf (d) yang berbunyi ”mengelola kekayaan daerah”.¹¹ Selain isi dari pasal 21 , di jelaskan pula di pasal 22 Huruf (b) bahwa daerah mempunyai kewajiban “meningkatkan kualitas

¹⁰ Edy Panggabean, *Buku Pintar Kopi* (Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2019), h. 251.

¹¹ Sarman & M. Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 103.

kehidupan bermasyarakat” serta di Huruf (j) yang berbunyi “Mengembangkan Sumber daya Produktif”. Bahwasanya sudah menjadi kewajiban Pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya, demi untuk kemajuan serta peningkatan daerahnya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah S.W.T :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa : 58).*¹²

Menurut Imam At-Thabari dalam tafsirnya, ayat ini ditujukan kepada para pemimpin, pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam memberikan keputusan. Didalam Islam sendiri merupakan suatu kewajiban bagi pemimpin untuk berbuat adil kepada rakyatnya agar segala bentuk kebutuhan rakyat baik berupa kebutuhan sandang, pangan, dan papan bisa tercukupi untuk kelangsungan hidup rakyatnya. Selain adil dalam memenuhi kebutuhan rakyat, seorang pemimpin harus bersikap adil dalam membuat suatu aturan maupun kebijakan kepada

¹² Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) : 58, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, 2002.

rakyatnya dengan maksud agar segala peraturan yang di telah dibuatnya tidak berat sebelah dan membebani rakyatnya, tetapi harus bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Kata adil tersebut bisa di ambil dari sebuah pemahaman yang di fatwakan oleh imam Jalaluddin As-Suyuti “Maksud dari adil adalah mengutamakan kepentingan yang paing di butuhkan dan menyamaratakan masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama”. Namun jika kebutuhannya berbeda, maka ketajaman putusan dalam berijtihad oleh pemimpin akan di pertaruhkan.¹³ Sebab itu seorang pemimpin dalam membuat suatu kebijakan maupun peraturan harus memiliki sudut pandang yang tajam dalam menentukan kemaslahatan rakyatnya.

Pada saat ini kopi di tingkat petani kecil pada umumnya di jual dalam bentuk biji berkulit tanduk dengan rata-rata harga jual Rp 19.000 rupiah untuk per kilo gramnya. Untuk pemasaran kopi secara modern, terdapat kelompok tani yang berguna untuk menampung hasil panen dari para petani kecil. Sementara itu untuk pemasaran secara tradisional, petani umumnya menjual hasil panennya ke pasar Tradisional.¹⁴ Setiap kelompok tani atau pengepul di pasar tradisional umumnya sudah memiliki jaringan supplier yang siap menampung hasil kopi dalam jumlah besar. Selama kopi berada di supplier, kopi di olah dengan mengupas kulit tanduk menggunakan mesin huller.

¹³“Kebijakan dalam islam” (On-line), tersedia di: <http://suarabersama.com/2017/12/konsep-kebijakan-dalam-islam/html> (3 Juli 2020).

¹⁴ Rika Astuti, (Masyarakat), wawancara, Desa datarajan II, Kecamatan Ulu belu, 13 Februari 2020.

Setelah itu supplier menjual kembali dalam jumlah yang besar ke trader atau perusahaan eksportir. Dari eksportir ini kopi di jual dalam bentuk kemasan karung goni atau kantong plastik ke pasar umum, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung mulai melirik kesejahteraan para petani kopi robusta di Lampung, dengan mengeluarkan suatu surat edaran yang di tetapkan dalam Surat Edaran Gubernur Lampung No. 045.2/2123/V.22/2018 Tentang Penggunaan Produk Kopi Lampung. untuk mendorong para pelaku usaha kuliner beralih menggunakan produk asli kopi robusta Lampung serta di sajikan pada saat acara rapat dan pertemuan, dengan maksud untuk meningkatkan penumbuhan dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Selain itu, adanya suatu Surat Edaran Gubernur Lampung No. 045.2/2708A/V.20/2019 Tentang Hari Jumat Sebagai Hari Minum Kopi. yang mengedukasi masyarakat Provinsi Lampung untuk lebih mengenal serta menghimbau untuk meminum kopi robusta asli petani kopi Lampung disetiap hari Jumat. dari surat edaran yang di dikeluarkan oleh Gubernur, diharapkan bisa memajukan industri kopi robusta Lampung serta meningkatkan taraf perekonomian para petani kopi robusta yang ada di Lampung dan untuk kedepannya Pemerintah Provinsi Lampung lebih berupaya untuk kemajuan kopi robusta Lampung dengan membuat suatu Peraturan Daerah (PERDA) yang menghimbau dan mewajibkan para pelaku usaha rumah makan, restoran, kedai kopi dan sebagiannya untuk beralih menggunakan kopi robusta petani

dan pula juga perlu adanya pengawasan terhadap jual beli biji kopi yang di kendalikan oleh para tengkulak yang harganya kian merosot yang membuat petani menjerit rugi. Sebab harus adanya langkah responsif Pemerintah Provinsi Lampung dalam memajukan industri kopi dan mensejahterakan para petani kopi dengan berkoordinasi antara dinas terkait hingga bekerjasama dengan para penggiat kopi untuk membahas tata kelola dan tata niaga kopi, sehingga terciptanya suatu regulasi untuk kebangkitan kopi robusta Lampung yang di mulai dari mensejahterakan petaninya terlebih dahulu.

D. Fokus Penelitian

Lexy J Moleong mengungkapkan tujuan fokus penelitian adalah untuk membatasi studi secara efektif dan menyaring informasi.¹⁵ Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini lebih mengarah pada Perspektif Siyasah Dusturiyahnya. Karena pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi serta keterbatasan waktu dan dana, serta di lihat dari salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Provinsi Lampung, maka penelitian ini akan di laksanakan di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dan akan difokuskan pada “Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam Mensejahterakan petani kopi dan Industri Kopi Robusta Lampung”.

¹⁵ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 44.

E. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang di ambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam mensejahterakan petani kopi serta meningkatkan kemajuan industri kopi robusta berdasarkan Surat Edaran Gubernur Lampung No. 045.2/2123/V.22/2018 Tentang Penggunaan Produk Kopi Lampung?
2. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mensejahterakan petani kopi dan meningkatkan kemajuan industri kopi robusta berdasarkan Surat Edaran Gubernur Lampung No. 045.2/2123/V.22/2018 Tentang Penggunaan Produk Kopi Lampung?

Mengingat begitu banyaknya permasalahan yang terjadi dan adanya keterbatasan waktu, biaya, dan pengetahuan maka peneliti hanya membahas dan mengetahui yang sebenarnya pada masalah, yaitu “Upaya Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Mensejahterakan Petani dan Industri Kopi Robusta Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Petani Kopi dan Industri Kopi di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)”. Kemudian variabel diatas nantinya akan diketahui bagaimana pelaksanaan peran Pemerintah dalam upaya kesejahteraan petani dan kemajuan industri kopi robusta yang ada di Provinsi Lampung.

F. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian yang di lakukan pada dasarnya memiliki tujuan tertentu yang ingin di capai baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam menunjukan hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang di lakukan adalah :

- a. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam Mensejahterakan Petani dan Industri Kopi Robusta Lampung.
- b. Untuk mengetahui Perspektif Siyasa Dusturiyah terhadap Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam Mensejahterakan Petani dan Industri Kopi Robusta Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Masyarakat

Untuk memberi edukasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha produk makanan maupun kuliner yang ada di Provinsi Lampung agar sebisa mungkin untuk menggunakan kopi robusta petani Lampung agar bisa meningkatkan taraf ekonomi bagi petani kopi robusta.
- b. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dan untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu Hukum pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

c. Bagi Almamater

Dapat dijadikan bahan rujukan bagi mahasiswa Siyasah Syar'iyah untuk selanjutnya apabila ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹⁶ Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode penelitian akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁸ Adapun objek penelitian lapangan tersebut adalah Studi pada petani kopi dan industri kecil menengah

¹⁶ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 21.

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 2.

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 12.

(IKM) yang bergerak di bidang kopi robusta di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁹ Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinterpretasikan, dan kemudian disimpulkan.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu semua unit yang akan diteliti dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang menjadi fokus penelitian.²⁰ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para petani kopi robusta dan industri kecil menengah (IKM) yang bergerak di bidang kopi robusta Lampung yang berada di Kecamatan Ulu belu Kabupaten Tanggamus, dengan jumlah populasi sebanyak 25 orang

¹⁹ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7.

²⁰ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 42.

petani kopi robusta dan 25 orang yang ada di dalam industri kecil menengah (IKM).

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang hendak di generalisasikan. penelitian ini dalam menentukan sampel digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu, yaitu untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Petani Kopi Robusta yang di nilai sesuai untuk di jadikan sampel, dalam hal ini para petani kopi robusta yang ada di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Adapun jumlah sampelnya adalah 5 petani kopi/orang.
- 2) Pelaku industri kecil menengah (IKM) yang bergerak di industri kopi. Dalam hal ini para pengusaha industri kopi yang ada di Kecamatan Ulu Belu. Adapun jumlah sampelnya adalah 2 IKM/orang yang ada di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.
- 3) Pihak dari Instansi Pemerintahan setempat. Dalam hal ini diwakilkan oleh Camat Ulu Belu. Adapun jumlah sampelnya adalah 1 orang. Jumlah sampel semuanya adalah 5 orang + 2 orang + 1 orang = 8 orang.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber primer yang penulis peroleh dari *Al-Qur'an*, dokumen-dokumen resmi, buku-buku tafsir, *hadist*, buku-buku *fiqh siyasah*, buku-buku tentang kopi, dan hasil penelitian jurnal skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara (*interview*).²¹ Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan sesuai sample yang ada di Kecamatan Ulu Belu serta beberapa objek penelitian yang lainnya.

4. Metode pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi biasa diartikan “sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis dan terarah mengenai fenomena yang akan diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal

²¹ J. Supranto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 2.

ini observasi yang akan dilakukan peneliti yaitu melakukan pengamatan terhadap upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam memajukan petani kopi serta beberapa pengamatan terhadap industri kecil menengah (IKM) yang bergerak di bidang kopi yang berada di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

b. Metode Interview

Metode interview adalah suatu proses tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang atau dapat melihat yang lain dan mendengarkan sendiri tanpa alat bantu lain.²² Dalam hal ini yang akan sebagai objek interview peneliti yaitu beberapa petani kopi robusta dan pelaku industri kecil menengah (IKM) di bidang kopi, yang berada di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dan juga pihak dari Pemerintah setempat.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, makalah, dan dokumen lainnya. Adapun pelaksanaan metode ini adalah dengan mencatat data yang ada pada dokumen-dokumen, buku pedoman, dan arsip yang ada.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, jilid 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 192.

5. Metode Pengelolaan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengelola data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. Sistematisasi data, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.²³

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian dilakukannya analisis data. Adapun metode yang akan digunakan dalam analisa adalah metode Kualitatif yaitu apabila suatu data yang terkumpul hanya sedikit, bersifat monografis atau wujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam struktural klasifikasi), maka analisisnya bersifat deskriptif kualitatif, selanjutnya analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan terakhir sebagai jawaban dari permasalahan yang di teliti yaitu upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mensejahterakan petani dan industri kopi robusta perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* berdasarkan

²³ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 26.

Surat Edaran Gubernur Lampung No. 045.2/2123/V.22/2018 Tentang Penggunaan Produk Kopi Lampung. Setelah semua data terkumpul, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berfikir induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan kongkrit, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep *Siyasah Dusturiyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Sebelum melakukan pembahasan tentang *fiqh siyasah dusturiyah*, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari *fiqh siyasah*, yaitu merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁴ *Fiqh* juga dapat disimpulkan sebagai pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* yang disusun dengan jalan ijtihad.

Kata *siyasah* secara etimologi (bahasa) berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus, memimpin, dan memerintah. Menurut para ahli, *siyasah* memiliki beberapa arti, yaitu:²⁵

²⁴ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zhada, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 2.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 3-4.

- a) Ibnu Manzhur, beliau berpendapat bahwa *siyasah* berarti mengatur sesuai Peraturan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.
- b) Abdul Wahab Khalaf, menyatakan bahwa *siyasah* adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan.
- c) Abdur Rahman Taj, mendefinisikan *siyasah* merupakan hukum yang mengatur kepentingan seluruh umat agar sejalan dengan syariat, walaupun tidak bersumber dari ayat *Al-Qur'an* dan/atau *Sunnah*.²⁶

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *siyasah* adalah mengatur atau mengurus kehidupan bermasyarakat atau bernegara yang bertujuan membimbing mereka untuk mencapai kemaslahatan umat dari kemudharatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk hukum Islam mengenai peraturan dan kebijaksanaan untuk kehidupan bermasyarakat yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dalam bernegara.

Beberapa ulama ketatanegaraan Islam berpendapat mengenai pengertian *fiqh siyasah*. Diantaranya adalah Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan

²⁶ Abdur Rahman Taj, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat Wa Al-Fiqh Al-Islami*, (Dar al-Ta'lif :Mishr, 1953), h. 10.

pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²⁷

Dalam hal ini, Pemerintah daerah dalam *Fiqh Siyasah* termasuk dalam *Wullat* (pemimpin daerah tingkat I dan II) atau biasa disebut dengan sebutan wali adalah orang yang di angkat oleh khalifah untuk menjadi pimpinan di daerah tersebut. Adapun negeri yang di pimpin oleh khalifah islamiyah bisa diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Masing-masing bagian itu disebut wilayah (setingkat Provinsi).²⁸ Orang yang memimpin wilayah (provinsi) disebut juga dengan wali.

2. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep Konstitusi (Undang-undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Prenadamedia Group, 2014), h. 4.

²⁸ Oksep Adhayanto, *Khilafah Dalam sistem Pemerintahan Islam*, (Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011), h. 96.

wajib dilindungi.²⁹ *Siyasah Dusturiyah* menurut Muhammad Iqbal kata *dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama, setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa arab *dusturi* berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah *dusturi* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara masyarakat dan Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).³⁰

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³¹

3. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulli,

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Prenadamedia Group, 2014), h. 177.

³⁰ Ali Akhbar Abaib, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah; Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h. 12.

³¹ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 47.

baik ayat-ayat *Al-Qur'an* maupun *Hadis*, *Maqashid Syari'ah*, serta semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:³²

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Dalam hal kajian teori *siyasah dusturiyah* dengan permasalahan antara pemimpin dengan rakyatnya serta proses dalam pembuatan Perundang-undangan, maka lebih cenderung kepada bidang *siyasah tasyri'iyah* yang

³² *Ibid*, h. 48.

termasuk dalam perwakilan persoalan rakyat, Perundang-undangan hingga masalah Peraturan daerah.

4. Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyah*

a) *Al-Qur'an*

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pokok dalam aturan agama islam yang menjadi dasar serta rujukan dalam menentukan hukum. *Al'Qur'an* adalah kalamallah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui perantara malaikat Jibril di goa hira untuk selanjutnya disampaikan ke umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman dalam hidup.

Berdasarkan *Al-Qur'an* Surah An-Nisa (4) Ayat 59, dijelaskan bahwasanya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (*Al-Quran*) dan Rasul (*sunnahnya*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan harikemudian. Yang demikian itu lebih utama (*bagimu*) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa (4) : 59).³³

³³ *Al-Qur'an* Surah An-Nisa (4) : 59, Departemen Agama RI, Mushaf *Al-Qur'an* Terjemah, 2002.

Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan, “*Taatilah Allah, Ta’atilah Rasul, dan Taatilah Ulil Amri,*” melainkan “*Taatilah Rasul dan Ulil Amri,*” maka yang demikian itu berarti, taatilah *Ulil Amri* itu selama mereka itu menaati Allah dan Rasul-Nya dan selama perintah mereka berdasarkan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, tapi kalau perintah mereka hanya berdasarkan kepada pikiran semata, tidaklah wajib menaati perintah *Ulil Amri* itu.

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsirnya yaitu *Tafsir Al – Mishbah* mengutarakan bahwa ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakan-Nya; *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Rasul-nya, taatilah Allah* dalam perintah-perintahnya yang tecantum dalam Al-Qur’an dan *taatilah Rasulnya* yakni Muhammad SAW. Dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tecantum dalam sunnahnya yang sah, dan perkenanankanya juga perintah *ulil amri*, yakni yang berwewenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian *di antara kamu* wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya.³⁴

³⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* Vol 2. h. 482.

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 berkaitan dengan kekuasaan (pemerintah) dan penguasa yang berkewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak (rakyat) dan menetapkan hukum dengan adil, sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dengan rakyat, baik dari kalangan militer maupun kalangan sipil. Rakyat pun wajib menaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah. Dalam Islam menjadi pemimpin dan dipimpin adalah amanah yang pasti akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak. Membangun pemerintah yang baik menurut ayat ini bukan hanya peran penguasa saja akan tetapi rakyat juga ikut dalam menentukan arah pemerintahan tersebut. Karena bagaimana mungkin suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik jika hanya pemimpinnya saja yang taat membangun sistem sedangkan rakyatnya melawan sistem dan memerintahkan kepada maksiat.

b) *Sunnah*

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah *Al-Qur'an*, merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan atau diamnya Rasulullah SAW. terhadap apa yang diperbuat oleh sahabat.

c) *Qiyas*

Qiyas berasal dari kata *qasa-yaqisu-qiyasan*, artinya mengukur dan ukuran, kata *qiyas* diartikan ukuran sukatan, timbangan, dan lain-lain yang searti dengan itu, atau pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau

penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya³⁵. *Qiyas* secara tegas adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Diartikan pula sebagai proses pemindahan hukum yang terdapat pada pokok kepada cabang dari *ashl* ke *furu*, karena adanya *illat* hukum yang sama, dan atau adanya *illat* yang tidak dapat diketahui dengan pendekatan kebahasaan. Definisi ini dimaknakan juga dengan alasan adanya *illat* hukum yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni.

d) *Al-Mashalahah al-Mursalah*

Pada umumnya *Al-Mashalahah al-Mursalah* digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh *syariat Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Sebab itu, penerapan *almashalahah al-murshalah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan *fiqh*, dikenal dengan istilah *istiqla'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan *al-mashalahah almurshalah* tidak akan menimbulkan kemaslahatan tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.³⁶

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 59.

³⁶ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 50.

e) *Al-Istihsan*

Al-Istihsan Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil yang menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy, melaksanakan dalil yang kuat di antara dua dalil.

f) *Istishab*

Istishab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang selalu menyertai, sedangkan menurut ahli *Ushul Fiqh* adalah membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih memerlukan ketentuannya sampai sekarang kecuali ada dalil yang mengubahnya. Menurut Ibnu Qayyim, *istishab* adalah melanjutkan ketetapan suatu hukum yang telah ada atau meniadakan suatu hukum yang sejak semula tidak ada.³⁷

B. Industri Kopi Robusta Dalam Surat Edaran Gubernur Lampung No. 045.2/2123/ V.22/2018 Tentang Penggunaan Produk Kopi Lampung.

1. Upaya Pemerintah Daerah

a. Pengertian Upaya

Upaya Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya yaitu usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).³⁸ Upaya juga dapat di artikan sebagai usaha,

³⁷ Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 4.

³⁸ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media), h. 568.

akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Dalam hal ini, upaya bisa di artikan sebagai salah satu solusi pemerintah dalam hal mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat.

b. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.³⁹ Dengan kata lain Pemerintah Daerah yaitu Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai instrumen penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

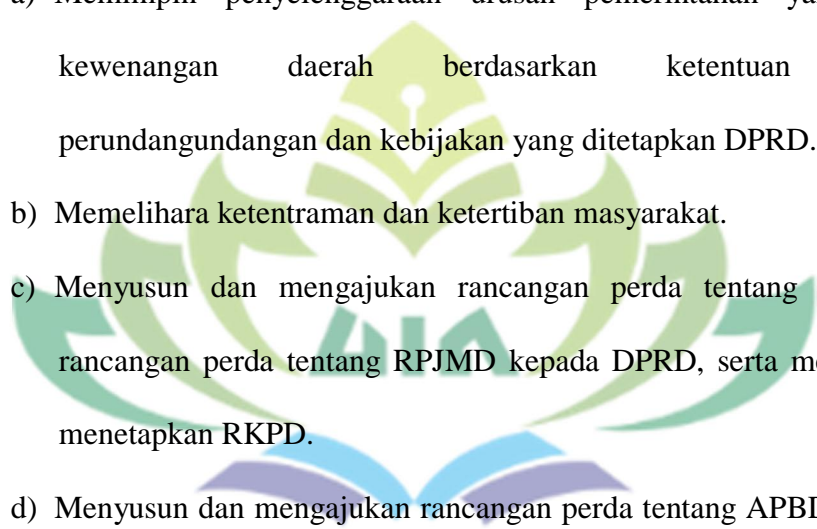
Dalam hal ini peran dari Pemerintah Daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara dan tindakan baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Selanjutnya yang disebut daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas

³⁹ Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Pasal 1 (Ayat 2).

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Peran Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah daerah hal ini yang di maksud adalah kepala daerah mempunyai peran sebagai berikut:

- 
- a) Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan DPRD.
 - b) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - c) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
 - d) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda.
 - e) Tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
 - f) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dari wakil kepala daerah menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 66 ayat (1), yaitu:

a) Membantu kepala daerah dalam:

- 1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
- 3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
- 4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota.

b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;

c) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan

d) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan

kepala daerah. Didalam melaksanakan tugasnya, wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.⁴⁰

d. Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Daerah berwenang :

- a) Mengajukan rancangan perda.
- b) Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- c) Menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah.
- d) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.
- e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Dalam menjalankan wewenangnya pemerintah daerah, dalam hal ini yaitu kepala daerah harus mengutamakan prinsip keadilan dalam menjalankan wewenang serta tugas dan tanggung jawabnya karena, semua rakyat mempunyai persamaan hak di depan hukum yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Dijelaskan dalam *Al-Qur'an* surat An-Nisa ayat 58 :

⁴⁰ Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan* (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2011), h. 104.

⁴¹ Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daaerah.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa: 58).*⁴²

2. Petani

a. Pengertian Petani

Pertanian merupakan kegiatan kemanusiaan mengusahakan tanah dengan maksud untuk memperoleh hasil tanaman atau hasil hewan, tanpa mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah tersebut untuk mendatangkan hasil selanjutnya. pengertian petani, Dalam kamus Sosiologi karangan Soerjono Soekanto dikatakan bahwa yang dimaksud dengan petani (peasant) adalah seseorang yang pekerjaan utamanya bertani untuk konsumsi diri sendiri atau keluarganya.⁴³ Dalam Kamus Pertanian Umum petani juga memiliki arti yaitu orang yang menjalankan usaha tani dengan melakukan kegiatan pertanian sebagai sumber mata pencarian pokoknya.⁴⁴ Provinsi Lampung saat ini jumlah luas lahan perkebunan petani kopi

⁴² Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) : 58, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, 2002.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT. Raja Grafiando Persada, 1993), h. 363.

⁴⁴ Tim Penyusun Kamus PS, *Kamus Pertanian Umum* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2013), h.

berkisar 156,878 Hektar.⁴⁵ yang sebagian besar ditanami varietas kopi robusta.

Dari keseluruhan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Petani merupakan suatu pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya hayati dan dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta mengelola lingkungan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern.

b. Definisi Petani

1) Petani Pemilik

Merupakan petani yang memiliki lahan pertanian namun tidak mengerjakan sendiri budidaya pertanian pada lahan tersebut dalam hal ini khususnya budidaya padi. mereka melimpahkan budidaya tanaman padi yang dilakukan di lahan pertanian mereka kepada orang lain atau petani padi yang lain.

2) Petani Pemilik-Penggarap

Merupakan seorang petani yang memiliki lahan pertanian sekaligus mengerjakan sendiri budidaya tanaman padi pada lahan tersebut. Namun dalam proses-proses tertentu petani ini tetap membutuhkan bantuan dari petani lain, misalnya dalam proses menanam padi dan

⁴⁵ Data Statistik BPS, *Luas Areal Tanaman Kopi Robusta*, Provinsi Lampung, Tahun 2018.

panen padi, mereka membutuhkan tenaga dan bantuan dari petani padi lain. proses selebihnya dikerjakan oleh petani pemilik tersebut.

3) Petani Penggarap

Merupakan seorang petani yang dilimpahi wewenang untuk mengerjakan lahan pertanian milik petani lain. Dalam pengerjaannya modal yang digunakan selain proses budidaya tanaman bukan berasal dari pihak pemilik lahan pertanian, namun modal tersebut berasal dari petani penggarap sendiri. Biaya-biaya dalam proses budidaya tanaman menjadi tanggung jawab petani penggarap. Baru 30 hari setelah panen, petani pemilik mendapatkan hasil yakni bagi hasil dari hasil panen yang dilakukan pada lahan milik mereka.

Umumnya petani di Provinsi Lampung adalah petani pemilik-penggarap yang mengerjakan lahannya sendiri namun di bantu oleh beberapa pekerja, tetapi tidak kemungkinan dengan berkurangnya lahan yang ada maupun faktor yang lain tidak menutup kemungkinan para petani menjadi penggarap lahan milik orang lain, namun dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatannya.

3. Kopi

a. Pengertian Kopi

Ada dua spesies dari tanaman kopi secara umum yaitu arabika dan robusta. Arabika merupakan kopi tradisional, dan dianggap paling enak rasanya, sedangkan robusta memiliki kafein yang lebih tinggi. Jenis kopi

robusta dapat dikembangkan dalam lingkungan di mana arabika tidak dapat tumbuh, dan membuatnya menjadi pengganti arabika yang murah. Robusta biasanya tidak dinikmati sendiri, dikarenakan rasanya yang pahit dan asam. Robusta kualitas tinggi biasanya digunakan dalam beberapa campuran espresso.

Kopi arabika biasanya dinamakan oleh daerah di mana mereka diekspor, dua yang tertua adalah Mocha dan Jawa. Perdagangan kopi modern lebih spesifik tentang dari mana asal mereka, melabelkan kopi atas dasar negara, wilayah, dan kadangkala ladang pembuatnya. Satu jenis kopi yang tidak biasa dan sangat mahal harganya adalah sejenis robusta di Indonesia yang dinamakan kopi luwak. Kopi ini dikumpulkan dari kotoran luwak, yang proses pencernaannya memberikan yang unik.

Kopi diperoleh dari buah tanaman kopi (*coffea sp*) yang termasuk dalam familia *Rubiacea*. Ada banyak varietas buah kopi, namun yang utama dalam budidaya kopi di berbagai negara hanya beberapa varietas, yaitu kopi arabika, robusta, liberika dan excelsa yang dahulunya banyak ditanam di Afrika. Tanaman kopi menghendaki tanah dengan lapisan tanah atas yang dalam, yang gembur, dan yang mengandung banyak bahan organik. Tanah bekas abu gunung berapi sangat baik untuk tanaman kopi.

Untuk tumbuh subur diperlukan curah hujan sekitar 2000-3000 mm tiap tahun.⁴⁶

b. Sejarah Kopi

Sejarah penyebaran kopi dimulai dari Ethiopia (Afrika), sekitar abad ke- 3. Seorang penggembala kambing menemukan efek yang di timbulkan dari biji kopi pada ternak kambing mereka, yang membuat kambing tetap terjaga selama beberapa jam. Dari Ethiopia, kopi menyebar ke negara lain di Afrika, seperti Yaman dan Mesir.⁴⁷ Kopi yang di sangrai dan dibuat minuman pertama kali diperkenalkan di negara Arab, kemudian diabadikan sebagai salah satu jenis kopi, yaitu arabika. Beberapa ratus tahun kemudian, biji kopi dibawa melewati laut merah ke Arab dengan metode penyajian kopi yang lebih maju.

Memasuki abad ke-13 kopi menyebar ke Afrika Utara, negara-negara Mediterania, dan India, pada abad ke-14 hingga ke-15, budaya minum kopi sudah menyebar ke Turki, Mesir, Syria, dan Persia. Perkembangan selanjutnya, pada abad 16, kopi telah ditanam, dipanen dan diperdagangkan untuk dikonsumsi di seluruh tanah Mesir, Syria, dan Turki. Pada saat itu kopi menjadi minuman utama di negara-negara Islam.

⁴⁶ Siswoputranto, P.S. *Perkembangan Teh, Kopi, dan Coklat Internasional* (Gramedia: Jakarta, 1978), h. 129.

⁴⁷ Rahmat Rukmana, *Untung selangit dari agribisnis kopi* (Yogyakarta, Lily Publisher 2014), h. 31.

Penanaman kopi makin meluas hingga daerah-daerah di Afrika Utara, Mediterania, dan India.⁴⁸

Pada abad ke-16 seluruh produksi kopi dikuasai Arab. Pada masa itu belum ada budi daya tanaman kopi di luar Arab karena orang Arab mengeksport biji kopi yang tidak subur (infertil) dengan memasak dan mengeringkannya terlebih dahulu. Memasuki tahun 1600-an, seorang peziarah India berhasil membawa biji kopi ke luar Arab (Mekkah), dan kemudian ditanam di berbagai daerah di luar Arab. Pada tahun 1615, orang Italia untuk pertama kalinya berhasil membawa biji kopi dari Turki ke Venezia, tetapi hingga abad ke-17 bangsa Eropa belum mengenal kopi. Setahun kemudian, tepatnya tahun 1616, Belanda Menjadi negara pertama di Eropa yang berhasil membudidayakan kopi.⁴⁹

Pada tahun 1650, untuk pertama kalinya Inggris sudah memiliki ratusan kedai kopi. Penyebutan kata kopi biasa disebut dengan kata-kata *coffe* (Inggris), *cofe* (Prancis), *kaffe* (Jerman). Kopi (Indonesia). dan sebagainya bersasal dari kata kaffa ini. Akan tetapi, ada ahli lain yang menyatakan bahwa kata-kata tersebut berasal dari kata *qahwa* yang berasal dari bahasa Arab. Kata ini mempunyai kata kuat, mengacu pada minuman yang mengandung biji tertetu yang diseduh dengan air panas dan membuat orang yang meminumnya merasa lebih segar dan kuat. Kata

⁴⁸ *Ibid*, h. 32.

⁴⁹ *Ibid*

qahwa lalu diserap ke dalam berbagai bahasa didunia seperti yang disebut diatas.⁵⁰

c. Sejarah Kopi di Indonesia

Setelah populer di Jazirah Arab, para pedagang Arab lalu memperkenalkan kopi ke Eropa. Ternyata orang Eropa banyak yang menyukai kopi. Setelah itu, kopi berkembang menjadi salah satu komoditas perdagangan orang-orang Timur Tengah dan Eropa. Kopi yang dijual ke Eropa ini sudah diolah sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditanam. Penjualan benih dan biji kopi mentah saat itu dilarang oleh penguasa Jazirah Arab.⁵¹

Pada akhirnya biji kopi dapat diselundupkan ke Eropa. Orang-orang Eropa ini mencoba menanam kopi di negara mereka, tetapi tidak berhasil karena tanaman kopi tidak cocok akan kondisi iklim di Eropa. Tidak putus asa orang-orang Eropa lalu mencoba menanam kopi di daerah-daerah jajahan mereka yang beriklim tropis. Salah satunya adalah VOC yang menjajah yang membawa bibit kopi dari Marlabar untuk ditanam di Batavia. Bibit kopi ini lalu ditanam di lahan milik Gubernur Jenderal Willem Van Outhoorn.

Di Indonesia, tanaman kopi dikenal sejak tahun 1696, yang di datangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada awalnya pemerintah

⁵⁰ Tim Karya Tani Mandiri, *Rahasia Sukses Budidaya Kopi* (Bandung: Nuansa Aulia.2018), h. 2.

⁵¹ *Ibid*, h. 3.

Belanda menanam kopi di sekitar Batavia (Jakarta), Sukabumi, dan Bogor. Kopi juga ditanam di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera dan Sulawesi. Ekspor kopi Indonesia pertama dilakukan tahun 1711 oleh VOC, dan sepuluh tahun kemudian ekspor kopi terus meningkat hingga 60 ton pertahunnya. Indonesia menjadi Negara yang mengembangkan perkebunan kopi pertama di luar Arab dan Ethiopia.⁵²

Selanjutnya penanaman kopi meluas ke luar Jawa, seperti di Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Timor-Timor. di Sulawesi, kopi mulai di tanam sejak tahun 1750, di dataran tinggi Sumatera Utara dekat danau Toba ditanam sekitar tahun 1888, dan di Gayo dekat danau laut tawar pada tahun 1924. Penanaman kopi dalam bentuk kultur perkebunan mula-mula berkembang di daerah Semarang, Solo. dan Kedu (Jawa tengah), kemudian meluas di daerah Besuki dan Malang, hingga ke Sumatera terutama Lampung, Palembang, dan Sumatera barat.

Jenis kopi yang pertama kali ditanam di Indonesia adalah kopi arabika. Daerah penanaman kopi arabika dirintis di Kayumas, Blawan, Kalisat, dan Bondowoso (jawa timur). Umumnya kopi arabika tumbuh baik di daerah pegunungan maupun dataran tinggi. Memasuki abad ke-20 tanaman kopi arabika di Indonesia terserang penyakit karat daun (*Hemieia vastatrix*) yang hampir memusnahkan seluruh kebun kopi. Untuk

⁵² Rahmat Rukmana, *Untung selangit dari agribisnis kopi* (Yogyakarta: Lily Publisher 2014), h. 33.

menggantikannya, Pemerintah Hindia Belanda mendatangkan kopi Liberika untuk menanggulangi penyakit tersebut, tetapi varietas ini tidak begitu populer dan juga terserang penyakit karat daun,⁵³ maka di datangkan lagi jenis kopi robusta (*coffea canephora*) yang mempunyai karakteristik tahan terhadap penyakit karat daun dan produksinya tinggi. Kopi Robusta sendiri banyak di tanam di daerah Ngrangkah pawin (Kediri), Bangelan (Malang), Malang Sari, dan Kaliselogiri (Banyuwangi), Jawa Timur. Kopi robusta bisa tumbuh dan berproduksi dengan baik di dataran rendah.

Pada abad ke-18 dan 19, Indonesia dikenal sebagai produsen kopi arabika, dan awal abad ke- 20 menjadi produsen kopi robusta. Selanjutnya, kopi arabika dan robusta berkembang sebagai tanaman perkebunan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sehingga beberapa waktu yang lalu, kata “Kopi” dan “Pulau Jawa” sangat dikenal di luar negeri. Dalam perkembangan selanjutnya, daerah penyebaran dan penghasil kopi utama di Indonesia adalah Sumatera, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Irian Jaya.⁵⁴

d. Perkembangan kopi di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu produsen dan juga sekaligus konsumen penting komoditas kopi. Sebagai produsen, Indonesia

⁵³ *Ibid*, h. 34.

⁵⁴ *Ibid*

menempati urutan keempat setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia, dan sebagai Konsumen Indonesia menempati Urutan ketujuh (*International Coffee Organizaton* (ICO), 2017). Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, minum kopi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari terutama bagi orang tua sampai ke kalangan remaja. ICO (2015) Menunjukkan pertumbuhan peminum kopi di Indonesia berkembang pesat, lebih daripada pertumbuhan dunia, yaitu 8% untuk pertumbuhan peminum kopi Indonesia sedangkan pertumbuhan peminum kopi dunia hanya mencapai 6%.⁵⁵

Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI), menyebutkan pertumbuhan konsumsi kopi nasional meningkat dari 0,8 Kilogram per kapita menjadi 1,3 kilogram per kapita. Perkembangan Industri kopi dunia juga berimbas pada industri kopi Indonesia mengalami peningkatan pada industri hilir sebagaimana terlihat pada maraknya kafe dan kedai kopi saat ini. Kopi sebagaimana produk perkebunan di Indonesia juga cukup penting, menempati urutan keenam setelah kelapa sawit, karet, gula, teh, dan Kakao. Posisi Indonesia sebagai konsumen penting karena kenaikan permintaan dalam negeri dapat mengurangi ketersediannya untuk pasar ekspor bagi pasar dunia. Kecenderungan penting industri kopi terangkum dalam review tahunan ICO tahun 2016. Pertama dalam hal produksi,

⁵⁵ Buku, *Peluang Usaha IKM Kopi* (Kementerian Perindustrian, 2017), h. 1.

ketersediaan kopi robusta akan mendapat tekanan, karena cuaca telah memengaruhi produksi kopi di Vietnam dan Indonesia.⁵⁶

Indonesia menjadi penghasil kopi arabika terbaik di dunia dan sebagai penghasil kopi Robusta terbaik kedua di dunia setelah Vietnam. Total produksi kopi Indonesia mencapai 700.000 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, 80% kopi robusta dan 20% kopi arabika diekspor. Indonesia saat ini mengembangkan kopi special dari jenis robusta mengingat pasarnya sangat menjanjikan yaitu fine robusta. Untuk menghasilkan kopi spesial robusta dengan kualitas yang tinggi tidaklah mudah karena terkait dengan persyaratan khusus mulai dari petik, fermentasi sampai pada pemilihan biji.⁵⁷ Karena mempunyai cita rasa dan aroma yang khas yang diminati dunia, Negara tujuan utama ekspor kopi Indonesia antara lain Negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), Negara kawasan Amerika Khususnya Amerika Serikat, dan Negara di kawasan Asia, seperti Jepang, Singapura, Korea, dan Malaysia.

Potensi sumber daya agribisnis kopi Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal, karena tingkat produktivitas kopi Indonesia baru mencapai 760 kg/hektar. Bisa kita bandingkan dengan potensi lahan dan pencapaian produksi kopi di beberapa Negara produsen kopi dunia, seperti Vietnam yang hanya memiliki lahan produktif seluas 550.000 hektar mampu

⁵⁶ *Ibid*, h. 2.

⁵⁷ Rahmat Rukmana, *Untung selangit dari agribisnis kopi* (Yogyakarta: Lily Publisher 2014), h. 4.

menghasilkan 2.000-3.000 kg/ha, dan Brasil memproduksi 3.000-4.000 kg/ha.⁵⁸ Pasar kopi dunia yang di dominasi robusta dengan harga lebih stabil, namun sejak 2016 pasar robusta juga telah tampak naik, dengan indikasi pasar berjangka London naik lebih dari sepertiga sejak maret 2016. hal ini disebabkan oleh meningkatnya kekhawatiran pasokan atas ketersediaan kopi robusta. ICO (2015) Menerbitkan hasil studi yang melihat biaya produksi dan keberlanjutan ekonomi dari budidaya kopi yang menunjukkan bahwa bagi banyak produsen, produksi kopi tidak lagi menguntungkan.⁵⁹ Pendapatan dari usahatani kopi tidak mampu menutupi biaya produksi. Masalah di hulu ini merupakan ancaman terhadap keberlanjutan dan tantangan utama industri kopi.

Bagi Indonesia, pasokan kopi robusta dunia yang berkurang memberi kesempatan untuk mengisi celah, meskipun kejadian cuaca yang tidak dapat diprediksi bisa juga menjadi masalah. hal tersebut dapat memicu penggunaan kopi arabika lebih banyak, sehingga dapat diharapkan harga akan naik.⁶⁰ Era ini adalah kesempatan untuk mempromosikan kopi arabika yang bisa mendapatkan harga lebih tinggi dan memperoleh pendapatan dari ekspor. Tidak menutup kemungkinan juga untuk mengembangkan kopi fine robusta menjadi ikon kopi robusta Indonesia, dikarenakan memiliki aroma dan rasa yang khas akan menjadi pasar

⁵⁸ *Ibid*, h. 5.

⁵⁹ Buku, *Peluang Usaha IKM Kopi* (Kementerian Perindustrian, 2017), h. 3.

⁶⁰ *Ibid*, h. 4.

domestik yang dinamis menjadi alternatif dan jaring pengaman melawan volatilitas harga Internasional. Indonesia memiliki sektor kopi yang kompetitif dan memerlukan kolaborasi dan koordinasi antara sektor publik dan swasta.⁶¹

e. Jenis Kopi di Indonesia

1) Arabika

Tanaman kopi arabika (*coffee arabica*) pertama kali di perkenalkan ke Indonesia pada tahun 1880. dan di budidayakan di Indonesia. Kopi jenis arabika sangat baik di tanam di daerah yang berketinggian 1.000-2.100 meter di atas permukaan laut (mdpl). Semakin tinggi lokasi perkebunan kopi, cita rasa yang di hasilkan oleh biji kopi akan semakin baik. Sebab perkebunan kopi arabika hanya terdapat di beberapa daerah tertentu (di daerah yang memiliki ketinggian di atas 1.000 mdpl). Namun luas area perkebunan kopi arabika hanya berkisar 12%, dari 1,3 juta ha total area perkebunan kopi.⁶²

Kopi arabika biasanya memiliki cita rasa yang variatif, tergantung lokasi tumbuhnya, antara lain rasa fruity, rempah-rempah, dan lain-lain. Sebagian besar kopi yang ada di buat dengan menggunakan biji kopi tersebut. Kopi arabika juga dikenal memberikan rasa kopi yang

⁶¹ *Ibid*, h. 4.

⁶² Edy Panggabean, *Buku Pintar Kopi* (Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2019), h. 28.

ringan, dan tidak menyebabkan gangguan terhadap irama tidur karena memiliki kadar kafein sekitar 1,2%, serta memiliki aroma yang khas.⁶³

Kopi arabika berasal dari Ethiopia dan sekarang telah banyak dibudidayakan di berbagai belahan dunia, mulai dari Amerika Latin, Afrika Tengah, Afrika Timur, India, dan Indonesia. Meskipun tersebar di berbagai negara tersebut, sebanyak 80% produksi kopi arabika di dunia masih berasal dari Brasil. Sehingga berasal dikenal sebagai produsen kopi arabika terbesar sekaligus juga penghasil kopi terbesar di dunia.⁶⁴

2) Robusta

Kopi robusta (*coffea canephora*) mulai diperkenalkan di Indonesia tahun 1900-an untuk pengganti kopi arabika yang hancur akibat serangan karat daun. Kopi robusta lebih tahan terhadap organisme pengganggu tanaman sehingga dianggap sebagai alternatif yang tepat, terutama untuk perkebunan kopi di dataran rendah.⁶⁵ Tanaman pohon kopi robusta cocok di tanam di ketinggian 400-800 Mdpl, dengan suhu atau temperatur udara tahunan antara 21-24°C dengan curah Hujan antara 2.000-3.000 mm/tahun dan memiliki \pm 3 bulan kering. Karena makin tinggi elevasi, makin lambat pertumbuhan kopi robusta dan

⁶³ Buku, *Peluang Usaha IKM Kopi* (Kementerian Perindustrian, 2017), h. 12.

⁶⁴ *Ibid*, h. 13.

⁶⁵ Rahmat Rukmana, *Untung selangit dari agribisnis kopi* (Yogyakarta: Lily Publisher 2014), h. 69.

makin lama pula masa non produktifnya.⁶⁶ Kopi robusta atau robusta *coffee* atau *coffea* robusta, biasa disebut *conillon*, merupakan spesies kopi yang berasal dari Afrika barat, banyak tumbuh di Afrika dan Brasil. Kopi jenis ini juga tumbuh di Asia Tenggara ketika Prancis memperkenalkannya pada akhir abad 19 di Vietnam.

Produksi kopi robusta Vietnam melampaui Brasil, India, dan Indonesia yang membuat Vietnam menjadi penghasil kopi robusta nomor satu di dunia. Sekitar sepertiga produksi kopi dunia adalah kopi robusta. Kopi ini lebih mudah perawatannya dibandingkan dengan kopi jenis lain. Kopi robusta termasuk tahan serangan penyakit karat daun, buahnya lebih kecil daripada kopi arabika, produksinya tinggi, daunnya lebih lebar dan lebih rimbun.⁶⁷ Kopi robusta memiliki cita rasa yang pahit, sedikit asam, dan mengandung kafein dalam kadar lebih tinggi sehingga memberikan efek sulit tidur dan debar jantung yang berlebihan.⁶⁸

Robusta juga mempunyai tekstur yang lebih kasar dengan warna bervariasi sesuai dengan kopi ini akan berbeda untuk setiap negara dan menghasilkan rasa yang juga berbeda. Beberapa daerah penyebaran kopi robusta salah satunya adalah Provinsi Lampung yang juga sebagai pemasok utama kopi robusta terbesar di tanah air dengan

⁶⁶ *Ibid*, h. 88.

⁶⁷ *Ibid*, h. 70.

⁶⁸ Buku, *Peluang Usaha IKM Kopi* (Kementerian Perindustrian, 2017), h. 13.

produksi rata-rata 100.000-120.000 ton pertahun dengan luas areal kopi mencapai 168.837 hektare.⁶⁹ Berdasarkan data sistem otomasi “IQFAST” karantina pertanian Lampung, sepanjang 2017-2019 biji kopi merupakan urutan kedua masuk dalam daftar 10 besar komoditas ekspor Provinsi Lampung.

Dilihat dari total ekspor 50 komoditas tumbuhan periode januari-juli 2019 yang dimiliki karantina pertanian Lampung, komoditas kopi telah menyumbang 1,8 triliun dari 4,3 triliun. “Kopi robusta telah menyumbang 41% devisa negara, dengan rata-rata frekuensi ekspor 102 kali perbulan, dan akan terus meningkat”. dari inipun bisa disimpulkan bahwa pemegang utama ekspor kopi Nasional untuk robusta masih di pasok dari Provinsi Lampung, dengan harga jual untuk kopi asalan sebesar Rp. 19.000/kg sedangkan untuk kopi premium maupun grade A (Petik merah) masih berkisar Rp 35.000/kg untuk harga dari petani. Sebab itu perlu adanya upaya dari pemerintah dan petani untuk terus konsisten dalam menjaga mutu dan harga kopi agar Provinsi Lampung tetap menjadi pemasok utama ekspor kopi robusta, Selain itu perlu adanya perhatian dari pemerintah terhadap

⁶⁹ Luas Perkebunan Kopi di Provinsi Lampung” (On-line) Tersedia di: <https://lampung.bps.go.id/dynamictable/2017/03/29/143/luas-areal-tanaman-kopi-robusta-perkebunan-rakyat-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung-2014-hektar-.html> (10 Oktober 2020).

kesejahteraan petani berupa bantuan pupuk bersubsidi maupun pelatihan penanganan kopi pasca panen.

3) Liberika

Coffea liberica atau kopi liberika pertama ditemukan di Negara Liberia. Banyak orang beranggapan bahwa tanaman ini berasal dari daerah tersebut. Padahal liberika juga ditemukan tumbuh liar di daerah Afrika lainnya.⁷⁰ Pohon kopi liberika bisa mencapai tinggi 18 meter. Ukuran buahnya lebih besar dibanding arabika dan robusta. Meski buahnya besar, bobot buah keringnya hanya 10% dari bobot basah. Penyusutan bobot ketika dipanen ini tentu kurang disukai oleh para petani, karena ongkos panen menjadi lebih mahal.

Hal ini membuat petani enggan mengembangkan kopi liberika sehingga produksi dan persebarannya tidak seramai arabika dan robusta. Meskipun masih dibudidayakan di beberapa daerah, tingkat produksi liberika adalah yang paling rendah dari jenis lainnya. Produksi liberika kiranya hanya sekitar 1-2% dari produksi kopi dunia. Penyebaran kopi liberika diantaranya berada di daerah, Tapanuli Selatan (Sumatera Utara), Tanjung Jabung Barat dan Timur (Jambi),

⁷⁰ Yulius Ferry, Handi Supriadi, Meynarti Sari, *Teknologi Budi Daya Kopi Aplikasi Pada Perkebunan Rakyat* (Jakarta: IAARD Press, 2015), h. 3.

Meranti (Riau), Jombang (Jawa Timur), serta daerah Waringin Barat, Kapuas, dan Katingan (Kalimantan Tengah).⁷¹

4. Industri

a. Pengertian Industri

Industri adalah suatu kelompok usaha yang menghasilkan produk yang serupa atau jenis. Sedangkan yang dimaksud dengan produk adalah suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh suatu usaha atau perusahaan. Dalam pengertian yang umum industri pada hakikatnya yaitu perusahaan yang menjalankan operasi dalam bidang kegiatan ekonomi yang tergolong ke dalam sektor sekunder.

Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1984 Tentang Perindustrian dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaan. Menurut Kartasapoetra, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perekayasaan industri.⁷²

Menurut Badan Pusat Statistik, industri mempunyai dua pengertian :

⁷¹ Edy Panggabean, *Buku Pintar Kopi* (Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2019), h. 42.

⁷² Pengertian Industri” (On-line), tersedia di: <http://www.materibelajar.id/2015/12/materi-ekonomi-teori-industri-menurut-html> (17 Oktober 2020).

- 1) Pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi bersifat produktif.
- 2) Pengertian secara sempit, industri hanyalah mencakup industri pengolahan yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi, kemudian barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih nilainya dan sifatnya lebih kepada pemakaian akhir.

Dari beberapa pengertian industri yang ada di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa industri adalah sebuah usaha rumahan yang memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi yang di kelola atau produksinya di rumahnya sendiri dengan banyak karyawan antara 5-19 orang.

b. Industri Kecil Menengah (IKM)

Pengertian Industri kecil menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), mendefinisikan industri kecil sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang maupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial, yang mempunyai nilai kekayaan bersih

paling banyak 200 juta rupiah dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar 1 milyar rupiah atau kurang.⁷³

Sedangkan industri kecil menurut M. Tohar bahwa industri kecil di definisikan dari berbagai segi yaitu :

- 1) Berdasarkan total asset, yaitu pengusaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 2.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka usaha.
- 2) Berdasarkan total penjualan, yaitu pengusaha kecil yang memiliki hasil total penjualan bersih paling banyak Rp. 1.000.000.000/tahun.
- 3) Berdasarkan status kepemilikan, yaitu usaha berbentuk perorangan yang bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang di dalamnya termasuk koperasi.⁷⁴

dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa industri kecil menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.

⁷³ Andri Ratnasari, “Peranan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Ponorogo”, (Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Vol. 1, No. 3, 2013), h. 5.

⁷⁴ M. Tohar, *Membuat usaha kecil* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 2.

C. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Sunarti yang berjudul “Peranan Dinas Pertanian (DISPERTA) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Tahun 2015”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Dinas Pertanian (Disperta) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan, Melalui pelaksanaan kegiatan usahatani, Peningkatan Produktivitas usahatani, Peningkatan Pendapatan usahatani serta kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pertanian dalam peningkatan kesejahteraan petani. Pengambilan data dilakukan dengan penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun dua jenis pengumpulan data yaitu dari metode *interview*, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kecamatan Sebatik Timur belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih memerlukan perhatian dan bimbingan kepada petani, mengingat masih rendahnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki petani serta masih kurangnya bantuan fasilitas pertanian.

Penelitian yang kedua adalah penelitian oleh Retno Rahmawati yang berjudul “Hambatan dan Strategi Pengembangan Usahatani Kopi Dalam Upaya Peningkatan Produksi di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun

2016”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dalam pengembangan usahatani kopi dalam peningkatan produksi dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usahatani kopi dalam upaya peningkatan produksi di Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung. Pengambilan data dilakukan dengan penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun dua jenis pengumpulan data yaitu dari metode *interview*, dan studi dokumentasi.

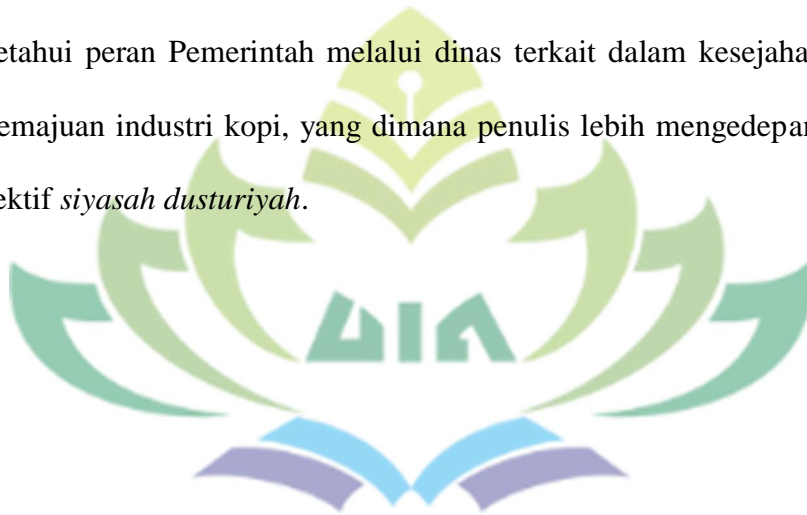
Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa hambatan dalam pengembangan usahatani kopi belum terlaksananya teknik baku budidaya, hasil olahan kopi belum diterima oleh pasar, tertutupnya akses informasi dan kurangnya promosi.

Berdasarkan uraian diatas, menurut peneliti terdapat perbedaan dan persamaannya dengan jurnal dan skripsi penelitian, seperti Sunarti yang berjudul “Peranan Dinas Pertanian (DISPERTA) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Tahun 2015”. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis adalah Peranan Dinas Pertanian dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kecamatan Sebatik Timur belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih memerlukan perhatian dan bimbingan kepada para petani, mengingat masih rendahnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki petani serta masih kurangnya bantuan fasilitas pertanian.

Sementara penelitian skripsi yang dilakukan oleh Retno Rahmawati yang berjudul “Hambatan dan Strategi Pengembangan Usahatani Kopi Dalam Upaya

Peningkatan Produksi di Kecamatan Candioto Kabupaten Temanggung Tahun 2016”. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengetahui hambatan dalam pengembangan usahatani kopi dalam peningkatan produksi dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usahatani kopi dalam upaya peningkatan produksi, karena belum terlaksananya teknik baku budidaya, hasil olahan kopi belum diterima oleh pasar, tertutupnya akses informasi dan kurangnya promosi di Kecamatan Candioto Kabupaten Temanggung.

Sedangkan persamaan dari penelitian keduanya dengan penulis adalah untuk mengetahui peran Pemerintah melalui dinas terkait dalam kesejahteraan petani dan kemajuan industri kopi, yang dimana penulis lebih mengedepankan tinjauan perspektif *siyasah dusturiyah*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdur Rahman Taj, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Dar al-Ta'lif : Mishr, 1953.
- Ali Akhbar Abaib, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah; Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara 2019.
- Al-Qur'an. Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an* Terjemah, 2002.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Buku, *Peluang Usaha IKM Kopi*. Kementerian Perindustrian, 2017.
- Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Seti, 2013.
- Edy Panggabean, *Buku Pintar Kopi*. Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2019.
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Idianto, *Ekonomi Pertanian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media. 2011.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- M. Tohar, *Membuat usaha kecil*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zhada, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Pedoman Penulisan Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019
- Rahmat Rukmana, *Untung selangit dari agribisnis kopi*. Yogyakarta, Lily Publisher 2014.
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- Sarman & M. Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Siswoputranto, P.S. *Perkembangan Teh, Kopi, dan Coklat Internasional*. Gramedia: Jakarta, 1978.
- Soerjono Soekanto, *kamus sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafiando Persada, 1993.
- Suryo Sakti, *Gubernur Kedudukan, Peran, dan Kewenangannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, jilid 1. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Tim Karya Tani Mandiri, *Rahasia Sukses Budidaya Kopi*. Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- Tim Penyusun Kamus PS, *Kamus Pertanian Umum*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2013.
- Yulius ferry dll, *Teknologi budi daya kopi aplikasi pada perkebunan rakyat*. Jakarta: IAARD Press, 2015.

Undang – Undang

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 65 ayat (2)
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Pasal 1 (Ayat 2)
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Jurnal

- Oksep Adhayanto, *Khilafah Dalam sistem Pemerintahan Islam*, (Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011.
- Andri Ratnasari, “*Peranan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam Penyerapan Tenaga kerja di kabupaten Ponorogo*”, Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Vol. 1, No. 3 Juli 2013.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. Vol 2.

Wawancara

- Bapak Ayus, IKM Helwah Coffee, Wawancara, Kecamatan Ulu Belu 12 Oktober 2020.
- Bapak Aziz, Petani Kopi, Wawancara, Kecamatan Ulu Belu 13 Oktober 2020.
- Bapak Hadi Santoso, IKM Mekar Jaya, Wawancara, Kecamatan Ulu Belu 12 Oktober 2020.
- Bapak Ridho Rahmadi, Petani Kopi, Wawancara, Kecamatan Ulu Belu 14 Oktober 2020

Bapak Slamet W, Petani Kopi, Wawancara, Kecamatan Ulu Belu 12 Oktober 2020.

Bapak Supriyono, Petani Kopi, Wawancara, Kecamatan Ulu Belu, 12 Oktober 2020.

Bapak Suwarno S.Ag, Camat Ulu Belu, Wawancara, Kecamatan Ulu Belu 12 Oktober 2020.

Rika Astuti, Masyarakat, wawancara, Desa Datarajan II, Kecamatan Ulu Belu, 13 Februari 2020.

Sumber On-Line

Ekspor Kopi Robusta Lampung (On-line), tersedia di :

<https://www.saibumi.com/artikel-97311-festival-kopi-lampung-2019-diharapkan-mampu-dongkrak-daya-saing-robusta-.html> (3 Maret 2020).

Kebijakan dalam islam” (On-line), tersedia di :

<http://suarabersama.com/2017/12/konsep-kebijakan-dalam-islam/html> (3 Juli 2020)

Luas Perkebunan Kopi di Provinsi Lampung (On-line) Tersedia di :

<https://lampung.bps.go.id/dynamictable/2017/03/29/143/luas-areal-tanaman-kopi-robusta-perkebunan-rakyat-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung-2014-hektar-.html> (10 Oktober 2020).

